

MADIUN PACITAN PONOROGO NGAWI MAGETAN TULUNG



Pembangunan Jembatan di Desa Karas, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dari anggaran BPBD Provinsi Jawa Timur. (Antoon/HARIANBANGSA)

Proyek Jembatan BPBD Provinsi Jawa Timur di Magetan Dikeluhkan Pekerja

Tunggak Upah Pekerja dan Material

Magetan - HARIAN BANGSA

Sungguh miris nasib para pekerja pembangunan proyek jembatan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur yang ada di Desa Karas, Kecamatan Karas, kabupaten Magetan. Mulai bekerja sejak akhir Desember 2022 hingga sekarang (18/01/2023), masih belum menerima upah mereka secara penuh.

Kepala pekerja pembangunan proyek asal kota Blitar, Tukimin men-

gaku, sangat sulit melakukan komunikasi dengan pihak CV Sinar Mulya Jaya untuk melaporkan hasil pekerjaan dan meminta pembayaran.

"Kita sudah bekerja disini mulai Desember 2022 ini, dan baru mendapatkan upah sekitar 5 juta. Sedangkan iri ada 12 pekerja yang saya pekerjaan baik dari luar kotadan masyarakat lokal sini," terangnya.

Tidak hanya lambat dalam membayar upah pekerja, proyek pembangunan jembatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini, juga masih menunggak sejumlah material bangunan.

Khozin, yang menjadi penyuplai

bahan material dari pekerjaan proyek tersebut mengungkapkan, bahwa pembayaran material hanya lancar di awal pekerjaan saja. Namun, saat proyek berjalan mulai tersendat-sendat dan menunggak hingga puluhan juta.

"Awalnya bagus pembayarannya langsung di transfer, namun akhir-akhir ini mulai sulit. Iri masih ada sekitar Rp 22 juta yang belum terbayar, sudah saya sampaikan tapi masih belum ada pembayaran," jelasnya.

Yang lebih mengherankan lagi, proyek tanpa papan nama di Desa Karas itu, di LPSE Provinsi Jawa Timur mempunyai nama paket Be-anja Ba-

har Material Perbaikan Pasca Bencana dengan Pagu anggaran Rp 3.064.049.428, tapi hasil negosiasinya hanya Rp 198.141.700, yang dimenangkan oleh CV Sinar Mulya Jaya dari Malang.

Sementara itu, mendengar berbagai permasalahan diatas, tim monitoring dari BPBD Magetan Rahayuningsih, mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak BPBD Provinsi Jawa Timur selaku penyedia anggaran.

"Saya hanya membantu melakukan monitoring atau pengawas, jadi kalau ada permasalahan seperti ini nanti akan kita sampaikan ke BPBD Provinsi Jawa Timur," tutupnya. (ton/sof)